



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEUKU AHMAD DADEK**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **671505**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.666.600.000

1. Tanah Seluas 1483 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 301.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/200 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/42 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
4. Tanah Seluas 1928 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
5. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 206 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/100 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
8. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
9. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 405.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



2. MOBIL, SUZUKI JIMNI MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
255.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	65.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.139.600.000
III. HUTANG	Rp.	20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.119.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.